

**Term of Reference (TOR) Diskusi Terbuka**  
**“Identitas Dan Feminisasi Kemiskinan Perempuan Tionghoa Surabaya”**

## **I. LATAR BELAKANG**

Persepsi umum tentang kelompok etnis Tionghoa di Indonesia –Tionghoa totok ataupun peranakan– terlanjur baku menjadi sebuah sentimen terhadap sebuah etnis yang selalu memonopoli dunia perekonomian. Pembakuan persepsi tersebut didukung oleh seperangkat penilaian yang berpijak pada fakta-fakta sejarah keberadaan etnis Tionghoa di nusantara pada beberapa abad yang lalu. Pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740 di Batavia oleh Belanda dengan dalih over populasi dan ketakutan sebagian kaum kulit putih atas progresifitas etnis Tionghoa di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, menjadi sebuah bingkai yang paralel dengan peristiwa pembantaian etnis Tionghoa selanjutnya, antara lain pembantaian di Kota Malang dan sekitarnya pada tahun 40-an akibat agresi militer Belanda, dan peristiwa Mei 1998 yang banyak menimpa kaum perempuannya.

Rangkaian peristiwa tragis yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia –terutama kaum perempuan– dapat dimaknai sebagai sebuah sejarah penyertaan dan penyingkiran oleh sebuah rezim yang berkuasa. Ada sebuah momen yang membuat penguasa mengikutsertakan mereka dalam pembangunan rezimnya, dan sebaliknya, ada momen lain yang membuat penguasa harus menyingkirkan etnis Tionghoa sebagai jalan keluar melanggengkan rezim. Pada suatu fase, penguasa melakukan pengelolaan keragaman etnis di Indonesia dengan pendekatan kekerasan, namun pada fase selanjutnya pendekatan tersebut berubah menjadi bentuk lain yang lebih produktif. Etnis Tionghoa dilokalisir dan dikonsentrasikan ke dalam sebuah wilayah tertentu untuk tetap dapat berpartisipasi dengan resiko konflik yang relatif rendah. Daerah konsentris etnis Tionghoa yang kerap dituding eksklusif –memang efek tersebut yang diinginkan setiap rezim yang berkuasa– sering disebut sebagai daerah pecinan. Pecinan adalah sebuah cara untuk tetap dapat bertahan hidup berdampingan dengan etnis lain dalam sebuah sistem pengelolaan keragaman etnis.

Saat ini ada ratusan pecinan yang tersebar di seluruh Indonesia. Orang-orang Tionghoa adalah kaum pekerja keras, ulet dalam berdagang, dan orang awam melihat mereka sebagai pedagang yang sukses. Persepsi tersebut menjadi penilaian tunggal atas keberadaan mereka sebagai masyarakat yang sebenarnya juga dekat dengan masalah-masalah sosial, misalnya kemiskinan.

Kota Surabaya dengan penduduk etnis Tionghoa yang relatif banyak –tentunya setelah etnis Jawa dan Madura– ternyata menyisakan sekelumit persoalan sosial pada sosok etnis Tionghoa dan komunitasnya. Mungkin kemiskinan juga menjadi atribut etnis Tionghoa di daerah lain di Indonesia misalnya di Singkawang, Kalimantan Barat, atau Cina Benteng di Tangerang. Namun etnis Tionghoa miskin yang bermukim di daerah sekitar Surabaya, terutama Surabaya Pusat, semakin menjadi minoritas yang terpinggirkan (*silent minority*) disebabkan ada praktik peminggiran yang berbau diskriminasi. Etnis Tionghoa miskin di Surabaya banyak yang tidak memiliki dokumen kependudukan (*undocumented*) oleh karena itu mereka tidak diakui sebagai Warga Negara Indonesia (*stateless*). Kebanyakan dari mereka adalah perempuan-perempuan dan pasangan Tionghoa yang sudah beranjak tua, dengan generasi dibawahnya yang nasibnya juga tidak menentu sebab sulit untuk

melakukan naturalisasi. Beberapa masalah yang timbul akhir-akhir ini selain kemiskinan: ketakutan akan dideportasi, tidak pernah mendapat perhatian atau bantuan dari pemerintah, serta tindak premanisme yang mengacau untuk kepentingan pemodal. Ada rencana pembelian tanah warga untuk pengembangan bisnis di sektor pariwisata. Belakangan mereka malah kerap menerima ancaman penggusuran petak rumah yang sudah lama mereka tinggali.

Perempuan-perempuan Tionghoa itu tetap bertahan di petak-petak kamar ukuran 3X4 – diantaranya mereka sewa per bulan. Mereka berusaha untuk berdagang, berjualan minuman kopi di warung yang lusuh, di pingir Sungai Kali Mas. Etnis Tionghoa di Tambak Bayan rata-rata bekerja di sektor informal, mereka bekerja sebagai kuli panggul, penjual krupuk keliling, buruh cuci pakaian, penjaga toko, dan penjahit. Mereka adalah keturunan generasi ketiga warga Cina yang tinggal di Tambak Bayan hampir seabad yang lalu. Menurut beberapa warga yang berdomisili di sana, yang menjadi akar masalah mereka adalah kemiskinan. Mereka berasumsi bahwa tidak ada inisiatif baik dari pemerintah untuk memperhatikan masalah di Tambak Bayan. Pengurusan status kependudukan mereka pun seringkali dipersulit. Akhirnya warga tidak bisa mengakses dunia luar seperti pendidikan, akses modal, usaha, dan bantuan sosial lain karena tak jelas status kependudukannya. Perempuan dan keluarga-keluarga miskin Tionghoa di Surabaya saat ini menghadapi berlapis problem sosial dan ekonomi, mulai dari ancaman penggusuran, sampai problem hak menjadi Warga Negara Indonesia yang terhalang dinding tebal praktik diskriminasi.

Melihat fenomena tersebut, ada beberapa pihak yang justru memanfaatkan kelemahan warga, sengaja menakut-nakuti agar menjual petak-petak huniannya. Mereka dipaksa untuk menyetujui harga jual rumah yang kelewat murah atas nama investasi pembangunan hotel, pembangunan pusat perbelanjaan, dan tempat wisata di pemukimannya. Saat ini penggusuran sudah dimulai berjalan, peta pembangunan sudah disiapkan untuk ‘mengusir’ warga Tambak Bayan. Lambat laun Tambak Bayan dan bangunan sejarahnya akan hilang berganti dengan tembok-tembok menjulang sebagai petanda menangnya kapital.

## II. PERMASALAHAN

1. Jika di masa lalu konsep pecinan lebih menyerupai praktik pengelolaan keragaman etnis oleh penguasa, maka fenomena di Tambak Bayan yang berlatar belakang masalah kemiskinan jelas bukan sebuah ‘langkah produktif’ yang diharapkan oleh pemerintah. Ada kecenderungan politik ruang yang dibangun dengan munculnya taipan-taipan lokal yang berupaya menyulap Tambak Bayan sebagai lahan bisnis: pembangunan hotel.
2. Masalah kewarganegaraan dan kependudukan yang dialami Tionghoa miskin, merupakan turunan dari masalah persepsi monolitik tentang eksklusifitas dan sifat kolegal mereka. Persepsi itu berubah menjadi pandangan tunggal yang melekat, menempel, dan menafikan fakta kemiskinan yang mereka alami. Jika Tionghoa miskin menolak ‘identitas Cina’ yang membuat mereka terbelenggu, maka sebenarnya seperti apa wajah identitas mereka saat ini?
3. Perempuan jelas menjadi korban dalam konteks kemiskinan, penetrasi modal, politik ruang pemerintah dan pengusaha, serta kebijakan daerah yang tak sensitif gender. Namun di ruang sosial yang lebih luas, mereka mencoba

mengkomunikasikan permasalahan yang mereka hadapi kepada khalayak umum. Langkah-langkah afirmatif pun ditempuh untuk mengurai rantai diskriminasi, dengan bersikap kritis terhadap aturan dan kebijakan kependudukan Kota Surabaya. Namun fakta kemiskinan masih belum tersentuh secara produktif oleh gerakan perempuan dengan agenda pengarusutamaan gender. Sebenarnya langkah strategis apa yang bisa mengurai kemiskinan dan mengintegrasikan generasi Tionghoa miskin ke dalam dinamika sosial?

### III. TUJUAN

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keragaman etnis –etnis Tionghoa di Surabaya– dalam perspektif ekonomi kebudayaan yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah perempuan dan kemiskinan.
2. Mengetahui modus pribumisasi Tionghoa miskin dalam konteks ‘identitas Cina’ yang membelenggu mereka untuk mendapatkan perhatian seperti halnya masyarakat lain yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Mencoba memaknai fakta kemiskinan di kalangan etnis Tionghoa sebagai landasan feminisme untuk mencetuskan langkah-langkah integratif perempuan memperkuat modal sosial dalam relasi kultural dan jaringan sosial-ekonomi yang lebih luas.

### IV. ACARA

Diskusi terbuka ini berjudul “*Identitas dan Feminisasi Kemiskinan Perempuan Tionghoa Surabaya*” akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 12 September 2008

Waktu : Pukul 15.00 WIB

Tempat: Kantor Desantara foundation

Jl. Pemuda 35 Depok, Telp: 021 7775425/ F: 021 77201121

Pembicara : Mega Christina (Wartawan *Sinar Harapan*, aktivis perempuan)

### V. PESERTA

Diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Desantara Foundation ini akan diikuti oleh masyarakat umum termasuk aktivis perempuan, mahasiswa, NGO, akademisi, budayawan, dan pengamat sosial.

### VI. PENUTUP

Demikian *Term of Reference* (TOR) ini dibuat untuk penyelenggaraan diskusi dan dipergunakan sebagaimana mestinya terkait pelaksanaan acara. Terimakasih.

**Franditya Utomo**

***Koordinator Diskusi***